

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini sektor pariwisata menjadi aspek penting dalam peningkatan pendapatan devisa negara, Indonesia sendiri sumber pariwisata cukup banyak dibandingkan dengan negara Asia lainnya, meliputi wisata sejarah, wisata alam serta wisata religi. Menurut (Khusniyah, 2020) kontribusi sektor pariwisata pada negara mencapai 15% dengan nominal PDB Rp 260 Triliun serta mampu menciptakan peluang kerja 12,6 juta jiwa. Hadirnya sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah dan masyarakat dalam mengangkat prekonomi sosial, keterlibatan pemerintah saat ini sangatlah penting dalam mendorong keberhasilan sektor pariwisata, hal itu dibahas dalam pembagian peran pemerintah daerah sebagai pengelola wilayah itu sendiri. Peran andil pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam termuat di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mencakup pada pembagian hak, wewenang dan mengatur urusannya sendiri demi kepentingan masyarakat. Hadirnya regulasi ini tentunya memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam melakukan urusannya sendiri, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat bekerja secara optimal. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa perlunya pengembangan sektor pariwisata sebagai bentuk pendorong keberhasilan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, mengatasi pengangguran, pengentasan

kemiskinan serta pelestarian cagar budaya. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam sementara waktu dari suatu tempat-ketempat lainnya dengan tujuan bersenang-senang menikmati objek wisata perjalanan (Wibowo L. A., 2008).

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Sleman No 11 Tahun 2015 menjelaskan perencanaan induk pembangunan sector pariwisata secara berkelanjutan, yang mencakup pada pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata serta kelembagaan kepariwisataan. Hadirnya kebijakan ini sebagai dukungan serta pandangan pengembangan sector pariwisata di masa akan datang, secara spesifik dijelaskan pada Peraturan daerah Kabupaten Sleman No 11 Tahun 2015 Perencanaan Induk pembangunan sector pariwisata tahun 2015-2025 Pasal 11 Huruf (a),(b), (c), (d) yang menjelaskan perencanaan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan sinergitas tata Kelola pariwisata daerah sleman melalui beberapa sector penggerak.

Isu-isu strategis mengenai sector pariwisata menjadi penting saat ini mengingat sector pariwisata sebagai sector pendorong pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendapatan asli daerah. Penting sector pariwisata ini tentunya tidak lepas dari Andil pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan berupa regulasi serta anggaran yang dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintah daerah yang maksimal. Kestinambungan pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam mencapai suatu tujuan yang

diinginkan. Menurut (Reso Vio Vani, 2020) keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan memiliki peran yang besar untuk mendorong keberhasilan pada kinerja satu sama lain.

Permasalahan- permasalahan yang menjadi isu-isu strategis, pemerintah Kabupaten Sleman yang termuat didalam dokumen Rencana Strategis(RENSTRA) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Permasalahan Isu-Isu Strategis

No	Bidang Pariwisata	Isu Strategis
1	Domain Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Stagnasi pengembangan produk pariwisata • Kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya Sadar Wisata dan internalisasi Sapta Pesona • Kualitas pelayanan wisata yang belum standar • Keterbatasan investasi di bidang pariwisata • Keterbatasan sarana transportasi
2	Domain Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang terintegrasinya upaya pemasaran yang dilakukan pemerintah dan swasta • Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata

3	Domain Kelembagaan dan SDM Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM Pariwisata yang profesional • Kurang optimalnya peran asosiasi pariwisata.
---	---------------------------------------	---

Sumber : Renstra Kabupaten Sleman 2017-2021

<https://dinkopukm.slemankab.go.id/diumumkan-setiap-saat/renstra-dinas/>

Permasalahan isu strategis yang dialami pemerintah daerah sleman dalam mengelola sektor pariwisata memiliki permasalahan yang kompleks, hal itu dapat dilihat dari data diatas ada tiga bidang fokus permasalahan sektor pariwisata. *Pertama*, destinasi wisata mengalami stagnasi sektor produk lokal pariwisata, belum maksimalnya kerjasama yang baik antara *stakeholders*, minimnya kualitas pelayanan yang jauh dari standar pariwisata. *Kedua*, dalam pengelola sektor pariwisata kabupaten Sleman masih minimnya integrasi promosi sektor pariwisata baik itu pihak pemerintah ataupun swasta. *Ketiga*, permasalahan yang menarik ialah kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan sektor pariwisata, artinya ialah masih minim tenaga ahli atau profesional yang mampu menggagas sektor pariwisata, dan yang tidak luput dari permasalahan ialah minimnya peran asosiasi antara sektor wisata dalam pengembangan sector tersebut. Peran penting asosiasi bisa dilihat sebagai bentuk mediator atau motivasi dalam mewujudkan sinergitas antar pihak agar dapat mewujudkan pengembangan sektor pariwisata (Wisnawa, 2021). Problematika yang di

hadapi pemerintah Kabupaten Sleman saat ini berhubungan dengan pengelolaan sektor wisata serta masih minimnya bertuk jalinan kerjasama dalam pengembangan sector wisata Adanya permasalahan dalam pengelolaan sektor wisata tentunya menjadi tantangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk dapat terus bersaing menghadapi kemajuan zaman yang terus berkembang. Dengan adanya problematika yang mengarah pada suatu jalinan kerja sama kepada asosiasi pariwisata pemerintah perlu menciptakan bentuk Kerjasama keberapa stakeholders untuk dapat menunjang ketercapaian sector pariwisata Sleman.

Beberapa tahun terakhir permasalahan yang tidak kunjung usai ialah pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar pada sector pariwisata, hal itu berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatwan mancanegara, yang berkunjung di wisata Kabupaten Sleman, berdasarkan hasil data pemerintah kabupaten Slmean adanya penurunan yang begitu dratis akibat pandemic covid19, berikut jumlah data kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara 5 tahun terakhir :

Tabel 1. 2 Jumlah Kunjungan Wisatwan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Sleman

Ket	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Wis nus	Wis ma n n	Wis nus	Wis ma n n	Wis nus	Wis ma n n	Wisn us	Wis ma n n	Wis nus	Wis ma n n
Reali sasi	5.07 5.31 5	248 .37 0	7.03 8.20 7	238 .48 8	8.22 4.03 3	307 .70 5	10.1 45.1 04	233 .01 4	4.22 6.07 5	24. 004

Jumlah Realisasi	5.323.658		7.276.695		8.531.738		10.378.118		4.250.119	
Persentase Wisatawan (%)	95,33	4,67	96,72	3,28	96,39	3,61	97,75	2,25	99,43	0,57
Kontribusi PDR Bhh (%)	10,2		10,29		10,16		10,36		8,84	

Sumber : <https://pariwisata.slemankab.go.id/>

Berdasarkan hasil jumlah data kunjungan wisatawan, pada tahun 2020 secara drastis mengalami penurunan sebanyak 4.250.199 orang, jika di bandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 ialah 5.323.685 orang, pada tahun 2017 7.276.695 orang, tahun 2018 berjumlah 8.531.738 orang, hingga 2019 berjumlah 10.378.118 orang kunjungan wisatawan baik itu local maupun mancanegara terus mengalami kenaikan, hal itu di pengaruhi oleh pada pandemi covid-19 yang belum terjadi. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan disebabkan oleh pandemi covid-19 yang terus meningkat serta pembatasan kegiatan masyarakat, adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk rekreasi liburan bertujuan untuk dapat menekan angka penularan dari virus covid-19 itu sendiri, di satu sisi berdampak pada matinya sektor ekonomi pariwisata (Kafabih, 2021).

Berfokus pada sector wisata Tebing breksi jumlah kunjungan wisatawan baik itu local maupun mancanegara mengalami penurunan hingga 85%, semenjak adanya pandemic covid19 jumlah kunjungan perhari hanya 200-400 orang (Yanti, 2021). Artinya ialah terjadinya permasalahan sector pariwisata Tebing Breksi baik itu pengelolaan maupun jumlah kunjungan wisatwan mengalami penurunan secara drastis dimasa pandemi covid19. Hal ini berbeda dari masa sebelumnya bisa mencapai 4000 orang perhari (Yanti, 2021). Berdasarkan data permasalahan sector pariwisata, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merespon dengan mendorong sector pariwisata menerapkan konsep *pentahelix*. Menurut (Tri Yuniningsih, 2019) konsep *collaborative governance* model *pentahelix* merupakan penggabungan beberapa sector penggerak meliputi Akademisi, Bisnis, Pemerintah (Government), Komunitas (Community) dan Media Massa, yang bertujuan mempercepat pengembangan sector pariwisata.

Pengelolaan sector pariwisata Tebing Breksi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sleman sejauh ini mencoba mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas serta kerjasama antar *stakeholder*, Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Tebing Breksi sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Keterlibatan *Stakeholder*

No	<i>Stakeholder</i>	<i>Interest</i>
----	--------------------	-----------------

1	<i>Academic</i> (PUSPAR UGM, Badan Promosi Pariwisata Sleman)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan Potensi masalah kepariwisataan
2	<i>Government</i> (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman,	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pencapaian visi RPJP DIY tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. • Pengelolaan sector pariwisata Tebing Breksi
3	Bisnis (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Produk local Kawasan wisata Tebing Breksi • Penginapan
4	Komunitas (Pokdarwis)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Tebing Breksi
5	Media (website https://tebingbreksi.com/)	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi, <i>marketing breeding</i> wisata Tebing Breksi)

Sumber: jurnal (Maria Gratia Plena Mervelito, 2020).

Idealnya pengembangan sektor pariwisata Tebing Breksi dengan melibatkan beberapa pihak di harapkan mampu berkembang sekaligus bersaing oleh wisata lainnya. Proses pengembangan wisata tebing breksi dengan melibatkan beberapa *stakeholders* realitanya masih memerlukan perbaikan kordinasi antar *stakeholders*, hal itu untuk dapat menciptakan

komunikasi intensif dalam merespon permasalahan yang ada ((Rista Lentera Ghaniyy W.M, 2017). Selain ini dari sisi pembangunan infastruktur Tebing breksi perlu adanya pembenahan fasilitas umum bagi pengunjung (ugm.ac.id. 24 Oktober 2017). Adanya permasalahan terkait pengelolaan wisata Tebing Breksi Alasan utama dari penelitian ini mencoba mengisi kekosongan ruang dari penelitian -penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada pengelolaan sektor pariwisata Tebing Breksi, namun belum adanya penelitian yang membahas mengenai pengembangan sector pariwisata melalui pendekatan *collaborative governance model pentahelix*. Di sisi lain pentingnya penelitian ini untuk mengetahui pola Kerjasama antar *stakeholders* yang di lakukan dalam pengelolaan wisata Tebing Breksi . Metode penelitian ini mencoba menggunakan metode deskriptif kualitatif pencarian data di lakukan secara langsung ke lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melihat problematika data diatas penelitian ini akan berfokus pada pengembangan sector pariwisata Tebing Breksi melalui pedekatan *collaborative gavernance model pentahelix*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah yang diteliti dalam peneltian ini yaitu : **Bagaimana strategi pengembangan Pariwisata Tebing Breksi melalui pendekatan *collaborative governance model pentahelix*?**

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan strategi pengembangan Pariwisata Tebing Breksi melalui pendekatan *collaborative governance model pentahelix*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi dan pengembangan pengetahuan serta menambah wawasan khususnya tentang pengembangan Pariwisata melalui pendekatan *collaborative governance model pentahelix*

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini harapannya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengenai strategi pengembangan Pariwisata Tebing Breksi , serta hasil penelitian ini bisa menjadi informasi dan wawasan masyarakat tentang pengembangan sector pariwisata Tebing Breksi Kabupaten Sleman.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini menggunakan 12 *Literature riview* yang memiliki permasalahan yang berbeda, hal ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan sector pariwisata yang lebih baik, khususnya pengembangan pengembangan sector pariwisata Tebing Breksi Kabupaten Sleman. *Literature riview* sebagai berikut :

Pertama, mengutip dari jurnal yang di tulis oleh Sabon, V. L., Perdana, M. T., Koropit, P. C., & Pierre, W. C. (2018) yang berjudul “ Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada Asean Economic Community”. Kinerja sector pariwisata telah memberikan bukti nyata kepada negara dalam menciptakan ruang ketenagakerjaan bagi masyarakat secara luas, Hasil positif dari adanya pembebasan visa, jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2011 hingga tahun 2016 meningkat sebesar 65% atau sekitar 10% pertahun, serta sektor pariwisata bisa menyumbang 10% dari total GDP Indonesia dengan jumlah nominal tertinggi di ASEAN. Selain itu permasalahan yang masih terjadi pada sector pariwisata indonesia ialah masih minimnya infrastruktur untuk menunjang peningkatan pelayanan pada sector wisata.

Kedua, mengutip dari jurnal yang ditulis oleh *Isdarmanto*, I. (2016). Yang berjudul “ Studi Kelayakan Aspek Strategis Desa Wisata Tembi Untuk Meningkatkan Pariwisata Dan Perekonomian Kabupaten Bantul Yogyakarta”. Temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa hadirnya desa wisata Tembi Kabupaten Bantul mampu meminimalisir permasalahan masyarakat yang mencakup pada permasalahan perekonomian masyarakat sekitar wisata Tembi. Perencanaan strategis yang di bangun untuk pengembangan desa wisata melihat pada potensi wisata yang di miliki serta program edukasi Pendidikan kebudayaan, Adapun potensi wisata yang dimiliki ialah budaya asli jawa serta Pendidikan melalui adat budaya dengan makna nilai-nilai leluhur.

Ketiga, mengutip dari jurnal yang ditulis Wahidin, N., dan Pujiyono, A. (2017), yang berjudul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Gemawang Di Kabupaten Semarang”. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa sector pariwisata khususnya desa wisata Gawangan mampu bersaing dengan wisata lainnya, hal ini memiliki buktinya dengan meningkatnya peningkatan perekonomian dan lapangan kerja milik pribadi, pada sebelumnya mayoritas pekerjaan masyarakat berorientasi pada pekerja buruh pabrik. Keberhasilan ekonomi yang di alami masyarakat tentunya memiliki hubungan colaboratif antara pihak Lembaga pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan sector pariwisata.

Kempat, mengutip dari jurnal yang di tulis Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Yang berjudul “Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik”. Pengimplemtasian system kolaborasi *governance* model *pentahelix* yang di terapkan di sector pariwisata Jawa Timur telah memberikan buktinyata terhadap perkembangan pariwisata Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan secara kolabarasi dengan para pebisnis, pemerintah, komunitas, akademisi dan media. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Industri pariwisata bisa sebagai penghasil devisa terbesar, namun di sisi lain terdapat beberapa *stakeholders* yang belum mampu bekerja secara optimal, salah satunya ialah media yang belum mampu mempromosikan pariwisata secara optimal. Menurut (Tri Yuniningsih, 2019) *collaborative governance* model *pentahelix* merupakan penggabungan

beberapa sector penggerak meliputi Akademisi, Bisnis, Pemerintah (Government), Komunitas (Community) dan Media.

Kelima, mengutip dari jurnal yang di tulis oleh (Adinugroho, 2017) yang berjudul “ Hubungan Perkembangan Wisata terhadap Ekonomi Wilayah di Gunung Kidul Selatan”. Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa sector wisata Gunung Kidul sejauh ini belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Hasil, analisis komparasi menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata pendapatan nominal kedua sektor tersebut pada tahun 2007 dan 2013. Analisis korelasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah kunjungan wisata dengan pendapatan sektor. Jumlah kunjungan yang tinggi belum tentu berhubungan dengan tingkat pendapatan sector.

Keenam, mengutip dari jurnal yang di tulis oleh (Hermawan, 2019) yang berjudul “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, diantaranya penghasilan masyarakat meningkat, meningkatkan peluang kerja berusaha, meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak di tentukan.

Ketujuh, mengutip dari jurnal yang di tulis oleh Ma Imam Arifa'illah Syaiful Huda dan M. Farouq Ghazali Matondang (2020) yang berjudul ” Strategi Pengembangan Potensi Wisata 5 Pantai Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul” . Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pengembangan yang di lakukan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengembangan 5 potensi wisata di Kecamatan Saptosari ialah meningkatkan pelayanan fasilitas kepada wisatawan, membentuk jalinan kerja sama ke bebarapa *stakeholders*, Mengadakan event yang menarik secara rutin (kalender event regional/nasional/international) dengan menjalin kerjasama dengan kelompok pengelola pariwisata, pengembangan wisata kuliner (Ikan laut) dan mengembangkan produk olahan ikan yang menarik.

Kedelapan, mengutip dari jurnal yang di tulis oleh (Andayani, 2019) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)”. Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa hadirnya pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya, bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hadir desatinasi wisata telah memberikan buktinyata kepada masyarakat mengenai perluasan kesempatan kerja dan

peningkatan pendapatan. Perluasan kesempatan kerja dilihat dari penciptaan kesempatan kerja dan pergeseran pekerjaan pokok maupun sampingan.

Kesembilan, mengutip dari jurnal yang di tulis oleh (Setiawan, 2016) “Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang”. Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan SDM dalam bidang pariwisata. Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembiayaan kawasan wisata memerlukan dukungan dari sektor public, private, dan society. Daya dukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya guna mendukung stabilitas kawasan Pariwisata.

Ke sepuluh, mengutip dari jurnal yang di tulis oleh (Navolino, 2019) “Kapabilitas Kelembagaan Ekonomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul DIY)”. Penelitian ini menjelaskan peran kelembagaan ekonomi dalam mengembangkan desa wisata, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi di desa tersebut. Disebutkan bahwa desa Tembi memiliki kelembagaan ekonomi yang bernama kelompok sadar wisata atau biasa disebut dengan pokdarwis. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa lembaga tersebut sudah optimal, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan ekonomi desa Tembi.

Ke sebelas mengutip dari jurnal yang di tulis oleh (Norsyaza Husna binti Albakeri D. M., 2021) yang berjudul “*Shifting in Tourism Policies and Issues Encountered by Tourists After The Emergence of Covid-19 Pandemic*”. Hasil temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sector pariwisata merupakan sector pendorong di abad 21, di samping itu sector pariwisata saat ini juga di hadapkan oleh pandemic covid19, yang membuat perilaku wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata menjadi berpengaruh. Pergersan perilaku wisatawan hal itu juga di pengaruhi oleh kebijakan yang berkaitan dengan meminimalisir penularan virus pandemic covid19.

Ke dua belas mengutip dari penelitian sebelumnya yang di tulis oleh (Mutiarin K. S., 2018)“ *Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016*”. Penelitian ini menjelaskan dalam pengimplemtasian konsep kolaborasi melibatkan tiga pihak, meliputi pemerintah desa, masyarakat dan sector swasta. Hasil temuan dalam ini menunjukkan bahwa hadirnya konsep kolaborasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) mampu menciptakan tata Kelola yang akuntabilitas dan sikap transparansi pada pengelolaan BUMDES Polanharjo, Klaten.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Sabon, V. L., Perdana, M.	Strategi Peningkatan	Hasil temuan sektor pariwisata termasuk dalam

	<i>T., Koropit, P. C., & Pierre, W. C. (2018)</i>	Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada Asean Economic Community	pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2015, sektor pariwisata bisa menyumbang 10% dari total GDP Indonesia dengan jumlah nominal tertinggi di ASEAN. Pada awal tahun 2016 resmi dimulai ASEAN Economic Community (AEC) yang merupakan kerja sama untuk peningkatan kinerja ekonomi.
2.	<i>Isdarmanto, I. (2016).</i>	Studi Kelayakan Aspek Strategis Desa Wisata Tembi Untuk Meningkatkan Pariwisata Dan Perekonomian Kabupaten Bantul Yogyakarta.	Hasil temuan penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dalam upaya peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan telah di optimalkan oleh pemerintah daerah dengan program kerja dan strategi perencanaan berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing.
3.	Wahidin, N., dan	Strategi Pengembangan Desa Wisata	Hasil temuan dalam penelitian ini menjelaskan Kuatnya peran sektor

	Pujiyono, A. (2017)	Gemawang Di Kabupaten Semarang	pariwisata telah memberikan buah hasil peningkatan perekonomian dan lapangan kerja milik pribadi. ada titik kelemahan pada pengelolaan sektor pariwisata Desa Gemawang yaitu lemahnya pemberdayaan masyarakat, hingga kelembagaan pariwisata terkait desa yang tidak kuat.
4.	<i>Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018</i>	Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik.	Penelitian ini menjelaskan kolaborasi dengan para pebisnis, pemerintah, komunitas, akademisi dan media. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Industri pariwisata menggunakan konsep kolaborasi mampu mendorong penghasil devisa terbesar.
5.	Gilang Adinugroho (2017)	Hubungan Perkembangan Wisata terhadap Ekonomi Wilayah di Gunung Kidul Selatan.	Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah kunjungan wisata dengan pendapatan sektor. Jumlah kunjungan yang tinggi belum tentu

			menjadi factor pertumbuhan ekonomi.
6.	Hary Hermawan (2016)	Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal	Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, diantaranya, penghasilan masyarakat meningkat, meningkatkan peluang kerja dan berusaha, meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata.
7.	Ma Imam Arifa'illah Syaiful Huda dan M. Farouq Ghazali Matondang (2020)	Strategi Pengembangan Potensi Wisata 5 Pantai Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul	Hasil temuan dari penelitian ini ialah strategi prioritas yang perlu dilakukan pada 5 pantai yaitu pemenuhan fasilitas umum , promosi pariwisata, event, bentuk kerja sama ke beberapa asosiasi ke pariwisata, dan membangun wahana di segala umur .
8.	(Andayani, 2019)	Pemberdayaan Masyarakat	Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan

		Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)	masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
9.	(Setiawan, 2016)	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang	Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa pengelolaan, penembangan dan pembiyaan kawasan wisata memerlukan dukungan dari sektor publik, private, dan society. Daya dukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya guna mendukung stabilitas kawasan Pariwisata.
10.	(Swapradinta & Navalino, 2019)	Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Dalam Pengembangan	Hasil penelitian menyebutkan bahwa lembaga tersebut sudah optimal, secara sumber daya

		Desa Wisata Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul DIY)	manusai sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan ekonomi desa tembi.
11	(Norsyaza Husna binti Albakeri D. M., 2021)	<i>Shifting in Tourism Policies and Issues Encountered by Tourists After The Emergence of Covid-19 Pandemic</i>	Pergeseran perilaku wisatawan di pengaruhi oleh kebijakan yang berkaitan dengan meminimalisir penularan virus pandemic covid19, hal itu membuat penurunannya kunjungan wisatawan.
12	(Mutiarin K. S., 2018)	<i>Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016</i>	Hasil penemuan ini menjelaskan bahwa konsep kolaborasi, yang melibatkan pihak pemerintah desa, masyarakat dan swasta mampu mendorong sikap akuntabilitas dan transparansi tata kelola BUMDES Polanharjo.

Dari beberapa studi terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan pengembangan pariwisata hanya melihat potensi wisata, potensi sumber daya manusia, dan tata kelola desa wisata terhadap pendapat ekonomi masyarakat serta daerah. Namun pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian di wisata Tebing Breksi menggunakan pendekatan Kolaborasi model *phentahelix* Pada penelitian ini dasarnya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa didalam penelitian ini membahas pengembangan sector pariwisata melalui pendekatan *collaborative governance model pentahelix*. Penelitian mengenai Wisata Tebing Breksi sendiri sejauh ini belum ada yang melakukan pendekatan menggunakan model *pentahelix governance*.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Pariwisata

Menurut Etimologi kata “ pariwisata” berawal dari kata “*Travel*” , yang di tafsirkan dalam bahasa Indonesia sebagai perjalanan yang dapat di lakukan lebih dari satu kali dari objek wisata satu ke objek wisata lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian wisata, pariwisata, sebagai berikut Wisata adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah

keragaman kegiatan wisata yang dibantu berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan *stakeholders*. Definisi pariwisata menurut beberapa ahli sebagai berikut.

Pertama, Oka A. Yoeti dalam jurnal (Sabri, 2015) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Kedua, Robert Mc Intosh dan Shashikant Gupta (Darsana, 2014) Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata adalah salah satu jenis industri yang dianggap mampu untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Berdasarkan penjelasan ke pariwisataan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang dilakukan, atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan kelompok bisnis dan kepentingan lain-lainnya.

2. Pengembangan Pariwisata

Menurut Brreto dan Gian (2015:34) pengertian pengembangan pariwisata ialah suatu upaya untuk mengembangkan destinasi atau memajukan objek wisata jauh lebih baik dari pada sebelumnya, hal itu meliputi tempat wisata dan nilai-nilai didalam wisata tersebut.

Pengembangan pariwisata merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pariwisata itu sendiri, hal itu bertujuan untuk dapat terus bersaing dengan sektor lainnya, dewasa saat ini sektor pariwisata telah menjadi aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan menjaga sumber kekayaan alam yang di miliki. Singkatnya pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian yang di bangun dalam upaya tindakan keberlanjutan untuk masa akan datang (Ricky Septiwirawan, 2020). Dengan di lakukannya pengembangan pariwisata di harapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, hadirnya pengembangan memeberikan pantikan kepada wisatawan untuk melakukan kunjungan ke objek wisata, hal ini tentunya memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat yang bergerak pada sector ekonomi pariwisata, meliputi jasa perjalanan, olahan produk cindramata , serta fasilitas penginapan.

Menurut Sastrayuda (2010:6-7) dalam perencanaan pengembangan meliputi:

1. *Participatory Planing*
2. Perencanaan Potensi
3. Perencanaan pemberdayaan masyarakat

4. Perencanaan berdasarkan wilayah
5. Optimalisasi potensi

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada maka diperlukannya pengembangan pariwisata sebagai aspek keberlanjutan di masa akan datang guna melindungi sumber daya yang dimiliki pariwisata dari pengaruh kerusakan alami ataupun *human error*. Hadirnya pengembangan ini sebagai bentuk upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Spillane (1994:63-72) terdapat beberapa unsur penting dalam pengembangan pariwisata sebagai berikut:

1. *Attractions* (daya Tarik)
2. *Facilities* (fasilitas)
3. *Infrastructure* (Infrastruktur)
4. *Transportations* (transportasi)
5. *Hospitality* (Keramahan)

Pentingnya pengembangan dengan melihat beberapa unsur yang terdapat didalam ke pariwisata menjadi indicator kemudahan dalam melakukan sebuah perkembangan, secara mendasar dapat di kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu proses perubahan dalam upaya memperbaiki objek wisata yang meliputi pemberdayaan manusia dan infrastruktur objek wisata.

3. Pandemic Covid-19

Menurut WHO virus Corona adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia (Yuzar, 2020). Beberapa jenis virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Merambaknya virus corona di Indonesia membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan membuat Tim Gugus Tugas Virus Corona 2019 dalam upaya memitigasi penyebaran virus Corona. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2020. Mitigasi penyebaran virus corona juga tertuang dalam PP Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Peran pemerintah tidak hanya dalam membuat regulasi tetapi pemerintah juga telah menetapkan protokol standar untuk mencegah penyebaran virus corona. Melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi ke-3 Pedoman Penanganan Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19).

4. Collaborative Governance Model Pentahelix

Konsep *Collaborative Governance* merupakan suatu konsep kerja sama yang di bangun untuk melibatkan beberapa *stakeholders*. Secara dasar kata “*Colaborative*” diartikan dalam bahasa indonesia adalah suatu jalinan

kerjasama beberapa pihak yang saling mengikat, sedangkan kata “governance” indetik oleh pembahasan perencanaan pemerintah. Secara sederhana untuk memahami *Collaborative Governance* ialah suatu proses perencanaan tata kelola pemerintah yang melibatkan beberapa pihak berkepentingan. Menurut (Azhari, 2017) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu pandangan yang di bangun atas dasar pengoptimalan sumber daya yang dimiliki, yang bertujuan pada kepentingan dan konsesus, dalam upaya mempercepat kinerja pemerintah. Dewasa saat ini *Collaborative Governance* tidak hanya menggunakan tiga aspek *stakeholders* yang mencakup pada pihak *Civil, Bussines, government*

Sejarah perkembangan teori *Collaborative Governance* berawal dari *Triple helix* pada tahun 1995 oleh Etzkowit dan Leydesdorff. Pada teori *Triple helix* menjelaskan bahwa teori ini di landaskan pada sebuah inovasi Kerjasama yang berorientasi pada pengembangan. Teori Etzkowit dan Leydesdorff model *Triple helix* memberikan tiga focus actor yang bergerak pada bidangnya. *Pertama*, bidang inovasi yang berperan penting dalam pembangunan atau menciptakan inovasi ialah sector Industry atau bisnis, dalam pemahaman ini peran industry tidak hanya semata-mata actor ekonomi melainkan pihak yang mampu melakukan pertumbuhan ekonomi, membuka pemberdayaan kepada masyarakat umum, mendorong pertumbuhan infrastruktur terhadap pelaynan serta melakukan perekrutan pada dunia bisnis. *Kedua*, akademisi bertanggung jawab pada pengembangan dunia pengetahuan, meliputi peran sebagai konseptor, pemberdayaan kedapa

masayarakat melalui ilmu pengetahuan, serta melakukan riset ilmiah terhadap isu-isu di ruang public. Artinya ialah peran akademisi sebagai sumber ilmu pengetahuan secara ilmiah melalui adopsi teori-teori, gagasan, konsep yang akan di konsumsi oleh khalayak public. *Ketiga*, bidang yang bertanggung jawab pada sebuah kebijakan ialah pemerintah, dalam hal ini peran penting pemerintah sebagai secktor yang mengatur urusan hukum, artinya ialah bahwa pemerintah memiliki hak dan wewenang dalam menciptakan sebuah kebijakan secara legal. Pengertian triple helix ini dapat di simpulkan bahwa hubungan kerja sama dari tiga sector (akademisi, swasta, pemerintah) yang di bangun atas dasar pada pertumbuhan ekonomi (Praswati, 2017).

Perkembangan teori *Collaborative Governance* model Quadruple Helix oleh Litberg memfokuskan pada peran penting masyarakat sipil sebagai subjek dari sebuah system Kerjasama. Pentingnya masyarakat sipil terlibat dalam sebuah kosep kolaborasi ini untuk mempercepat keberhasilan dari sebuah system, artinya ialah pentingnya masyarakat sipil bukan hanya sekedar target dari sebuah sistem melainkan ikut andil dalam pengembangan itu sendiri, hal itu akan mempermudah mencapai keberhasilan. keterlibatan akademisi, swasta, pemerintah dan masyarakat sipil merupakan sebuah system yang mampu berjalan secara efektif serta efisien dalam pengimplemtasiannya (Campbell, 2009).

Era digitalisasi 4.0 saat ini perkembangan kolaborasi terus berkembang pesat hingga tahun 2021, perkembangan terbaru teori *Colaborative Governance* menambahkan beberapa pihak berkepentingan,

salah satunya yang paling di di gadang-gadangkan ialah penambahan media sebagai langkah baru untuk menciptakan sinegritas yang optimal. Dalam proses perkembangan teori *Colaborative Governance* saat ini mendorong konsep model *pentahelix*. Menurut Arif Yahya dalam jurnal (Tri Yuniningsih, 2019) konsep *collaborative governance* model *pentahelix* merupakan penggabungan beberapa sector penggerak meliputi Akademisi, Bisnis, Pemerintah (Goverment), Komunitas (Community) dan Media Massa. Berikut skema konsep *pentahelix* sebagai berikut :

Bagan 1. 1 *collaborative governance* model *pentahelix*



Sumber: Arif Yahya dalam jurnal (Tri Yuniningsih, 2019)

Konsep *Pentahelix*

A. Akademisi

Akademisi pada model *Pentahelix* berperan sebagai *konseptor* yang melakukan analisis ilmiah secara mendasar dengan menggunakan pendekatan teoritis, sebagai pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia . Akademisi secara khusus merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru, pengamat pariwisata serta sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok masyarakat.

B. Bisnis

Bisnis pada model *Pentahelix* berperan sebagai *enabler*. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Bisnis berperan sebagai enabler yang menghadirkan infrastruktur, perekrutan SDM sebagai pelaku industri, membuka lapangan pekerjaan serta inovasi pelayanan.

C. Komunitas

Komunitas pada model *Pentahelix* berperan sebagai *akselerator*, Dalam hal ini komunitas merupakan perkumpulan kelompok yang bergerak pada kepentingan dan tujuan yang sama. Peran komunitas sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu memudahkan tujuan dan rencana bersama (Wisnawa, 2021).

D. Pemerintah

Pemerintah pada model *Pentahelix* berperan sebagai *regulator*, peran pemerintah sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab atas segala program kegiatan.

E. Media

Media pada model Pentha Helix berperan sebagai expender. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image* dalam sebuah program dan melalui *website* atau media lainnya sebagai media untuk promosi dan informasi.

Menurut Arif Yahya dalam (Handy Aribowo, 2018) pengembangan sector pariwisata yang di cantumkan dalam peraturan menteri (Permen) pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan, manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran academic, bussiness, community, and media.

G. Definisi Konseptual

1. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu proses perbaikan pembangunan daya tarik (*attractins*) objek wisata, *Accesability* , pemberdayaan masyarakat setempat dan *Amenity*.

2. *Collaborative Governance model Pentahelix*

Konsep *collaborative governance* model pentahelix merupakan penggabungan beberapa sector penggerak meliputi Akademisi, Bisnis, Pemerintah (Goverment), Komunitas (Community) dan Media.

H. Definisi Operasional

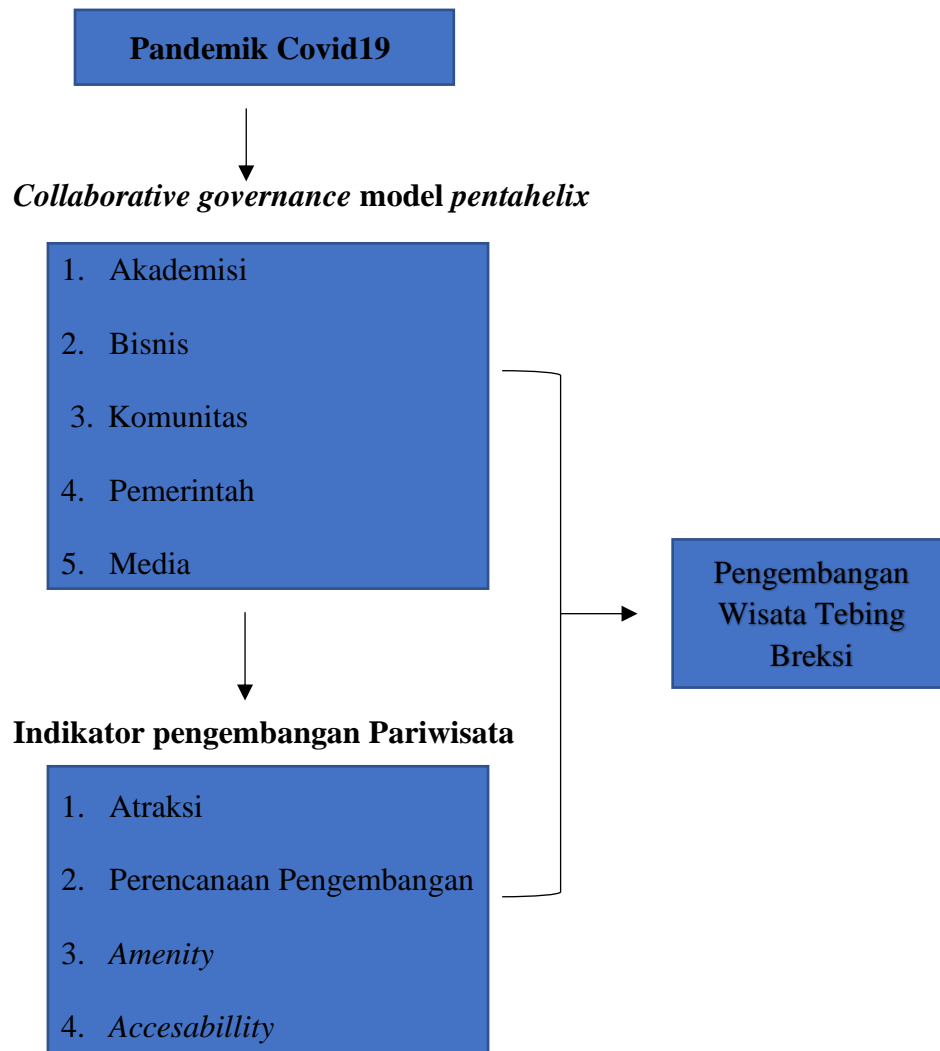
Pengembangan sector pariwisata merupakan suatu aspek penting dalam menunjang keberhasilan tata kelola pariwisata agar mendapatkan hasil yang optimal. Keberhasilan pengembangan sector pariwisata salah satunya yang menjadi acuan ialah banyaknya jumlah kunjungan wisatawan asing maupun local serta pengembangan objek wisata (Andayani, 2019). Untuk mengukur pengembangan pariwisata Tebing Breksi penelitian ini menggunakan lima indikator yang dapat di ukur dalam pengembangan wisata Tebing Breksi sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Collaborative governance</i> model pentahelix	1. Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep pembangunan Tebing Breksi • Pelatihan Sumber Daya Manusia Tebing Breksi
		2. Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan pekerja Tebing Breksi
		3. Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerator wisata Tebing Breksi • Program pelatihan dan pendampingan
		4. Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengembangan pariwisata Tebing Breksi
		5. Media	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi artikel,dokumen wisata Tebing Breksi. • Promosi pariwisata Tebing Breksi
2	Pengembangan pariwisata Tebing Breksi	6. Atraksi	<ul style="list-style-type: none"> • Daya Tarik Objek wisata Tebing Breksi
		7. Perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan program pendukung pemberdayaan masyarakat
		8. <i>Accesability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akses transportasi Tebing Breksi • Akses Jalan Tebing Breksi
		9. <i>Amenity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Fasilitas Tebing Breksi

I. Kerangka Berpikir

Bagan 1. 2 Kerangka Berpikir



J. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya penelitian guna menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang menjadi kajian penelitian untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan menemukan

jawabannya diperlukan suatu metode penelitian yang memadai. Metode penelitian juga turut akan menentukan tahapan-tahapan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintegrasikan data ditempat penelitian secara objektif. Untuk mendapatkan data yang tepat sesuai apa yang diinginkan maka akan dilakukan interview kepada beberapa instansi pemerintahan Kabupaten Sleman dan *stakeholders* Pendekatan secara kualitatif diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses yang terjadi di lapangan. Penggunaan jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan agar bisa mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintahan terkait di Kabupaten Sleman yang melaksanakan, membuat, serta terlibat dalam kebijakan mengenai Pengembangan sector pariwisata Tebing Breksi melalui pendekatan *Collaborative governance model pentahelix*. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Dapat dikatakan bahwasannya penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti (Margareta, 2013).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini untuk mengetahui pengembangan sector pariwisata Tebing Breksi melalui pendekatan *Collaborative governance model pentahelix*. antara lain yaitu Dinas Pariwisata Sleman, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media. Adapun alasan mengapa memilih beberapa lokasi tersebut karena penelitian ini ingin memahami, mengetahui, dan perhatian bagaimana pengembangan pariwisata melalui pendekatan *Collaborative governance model pentahelix* yang berlokasi penelitian di objek wisata Tebing Breksi.

3. Unit Analisa Data

Tabel 1. 6 Unit Analisa Data

No.	Instansi	Jumlah	Narasumber
1	Akademisi	1	Bidang Penelitian PUSPAR UGM
2.	Dinas pariwisata Sleman	1	Kepala Bidang pengembangan Wisata
3.	Bisnis	1	Humas Jeep Wisata Tebing Breksi
4.	Komunitas	1	Ketua Himpunan POKDARWIS
5.	Media	1	Pengelola Tebing Breksi
6.	Atraksi	1	Pengelola Tebing Breksi
7.	<i>Accesability</i>	1	Pengelola Tebing Breksi
8	Perencanaan pembangunan	1	Perencanaan pembangunan
9	<i>Amenity</i>	1	Pengelola Tebing Breksi
Jumlah			8

4. Jenis Data

1. Data primer

dilakukan dalam upaya memperkuat data tersebut.

Tabel 1. 7 Data Primer

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Strategi Pemkab dalam pengembangan sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	Wawancara
2.	Perekrutan pekerjaan di bidang bisnis dan menghadirkan fasilitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola wisata Tebing Breksi Jeep Wisata	Wawancara
3.	Peran Komunitas dalam mengembangkan wisata Tebing Breksi	<ul style="list-style-type: none">• POKDARWIS	Wawancara
4.	Publikasi dan promosi Wisata Tebing Breksi	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola Website dan media Tebing Breksi	Wawancara
5.	Daya Tarik Objek wisata Tebing Breksi	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola Wisata Tebing Breksi	Wawancara
7	Ketersediaan alat transportasi wisata Tebing Breksi	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola Wisata Tebing Breksi	Wawancara

8	Konsep Pembangunan Wisata Tebing Breksi	<ul style="list-style-type: none"> • PUSPAR UGM 	Wawancara
9	<i>Amenity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola Wisata Tebing Breksi 	Wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan atau dari data yang dikumpulkan dari tangan kedua. Data yang dikumpulkan dari komentar, interpretasi atau melalui sumber-sumber lain. Data sekunder dalam penelitian ini melalui internet maupun secara langsung, jurnal, buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.

Tabel 1. 8 Data Sekunder

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Perencanaan Strategis Kabupaten Sleman	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman	Dokumentasi
2.	Jumlah Pariwisata Sleman	Dinas pariwisata Sleman	Dokumentasi
3.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Sleman	Dinas Pariwisata Sleman	Dokumentasi
4.	Rencana Strategis	BAPEDA Sleman	Dokumentasi
5.	Rencana Kerja	Dinas Pariwisata Sleman	Dokumentasi
6.	Data Pengelolaan Wisata Tebing Breksi	Pengelola Wisata Tebing Breksi	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data seakurat mungkin mengenai variable yang dikaji dalam penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terkait dengan menggali informasi melalui percakapan, komunikasi dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber. Wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

Tabel 1. 9 Daftar Narasumber

No.	Informan	Jabatan	Uraian data
1.	Dwi Setyowati, ST M, Eng	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Strategi Pemkab dalam pengembangan sektor pariwisata
2.	Sakiran	<ul style="list-style-type: none">• HUMAS Jeep Tebing Breksi	Perekrutan pekerjaan di bidang bisnis menghadirkan fasilitas pelayanan
3.	Anni Sri Ningsih	<ul style="list-style-type: none">• Pedagang kuliner Tebing Breksi	Perspektif pedagang lokal terhadap kehadiran wisata Tebing Breksi
4.	Mujimin S.Sos	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Pokdarwis Sambirejo.	Fungsi Komunitas dalam mengembangkan wisata Tebing Breksi
5.	Bibit Lestari	<ul style="list-style-type: none">• Sekretaris Pokdarwis Sambirejo	Peran Pokdarwis dalam pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat

6.	Halim	<ul style="list-style-type: none"> • Humas Pengelola Wisata Tebing Breksi 	Daya Tarik Objek wisata Tebing Breksi
7.	Dr. Destha Titi Raharjana, S.Sos., M.Si	<ul style="list-style-type: none"> • Staff Bidang Penelitian PUSPAR UGM 	Konsep pembangunan Tebing Breksi berbasis riset

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, data tertulis, arsip, foto, dan jurnal kegiatan sebagainya yang tentunya diperoleh dari instansi-instansi Pemerintah Sleman dan *stakeholders*. Adapun dokumentasi yang di perlukan dalam penelitian ini ialah berupa pengambilan foto bangunan Tebing Breksi, foto data Tarik wisata Tebing Breksi. Pengambilan data publikasi dan promosi dari Tebing Breksi berupa unggahan di media . Dokumentasi ini bertujuan sebagai penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biken bahwasannya analisis data sebagai upaya untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara lengkap dan dapat dipahami. Adapun teknis analisis dalam penelitian kualitatif ini dapat dijelaskan ke dalam beberapa langkah berikut :

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil (Oliver, 2019). Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data, dimana pada langkah ini yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting lalu dicari tema dan polanya atau dengan kata lain proses yang dilakukan untuk menyederhanakan dan pemilihan data-data kasar atau temuan yang diperoleh di lapangan.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika pengumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknis analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan selanjutnya.

K. Teknik Analisa Data

Bagan 1. 3 Analisa Data

